

Vol. XVI, No. 2, Juli - Desember 2019

ISSN: 1693-9867 (p); 2527-5119 (e)

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Editorial Team:

Editor in-Chief

Islah Gusmian, IAIN Surakarta

Editorial Board

Mahrus eL-Mawa, Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta

Media Zainul Bahri, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga

M. Endy Saputro, IAIN Surakarta

Nashruddin Baidan, IAIN Surakarta

Managing Editor

Nur Kafid, IAIN Surakarta

Editor

Subkhani Kusuma Dewi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Yuyun Sunesti, UNS Solo

Editorial Assistant

Nur Rohman, IAIN Surakarta

Siti Fathonah, IAIN Surakarta

Reviewer

M. Faisol Fatawai, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang

Abad Badruzzaman, IAIN Tulung Agung

Fadhli Lukman, Universität Freiburg, Germany

Ahmad Fawaid Sjadzili, IAIN Madura

Ahmad Fuad Fanani, University of Toronto, Canada

Jajang A Rohmana, UIN Sunan Gunung Djati

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, UIN Ar-Raniry-Banda Aceh

Alamat Redaksi:

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta.

Jl. Pandawa No. 1, Pucangan, Kartasura, Jawa Tengah, 57168

Phone: +62271-781516, Fax: +62271-782774.

e-mail: jurnal.alaraf@gmail.com

web: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf>

AL-A'RAF

Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat

Tabel of Content

Kepentingan Politik Masyumi dalam Tafsir Annur Karya Tengku Muhammad Hasbi Ashshiddieq Abd. Rahman, Suci Wulandari	137
Paradigma Fisika Qur'ani dalam Tridharma Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Muslimah Susilayati, Mufiq, Barid Syamsiyah	161
Pemikiran Politik Islamisme Moderat Aljam'iyatul Washliyah Ja'far	191
Kritik Ibn Warraq Atas Orientalisme Edward Said: Perdebatan Epistemologis Mengenai 'Timur dan Barat' Media Zainul Bahri	223
Naturalisme-Teistik Abu Bakar Alrazi Isfaroh	247
Soekarno dan Argumen Teologis-Filosofis dalam Pemikiran Islam Imam Sukardi	267
Pluralisme Asimetris: Pluralitas dan Gerakan Sosial Masyarakat Indonesia Kontemporer Muhammad Abzar Duraesa, Muzayyin Ahyar	287
Indeks Penulis	311
<i>Author Guideline</i>	312

PEMIKIRAN POLITIK ISLAMISME MODERAT ALJAM'IYATUL WASHLIYAH

Ja'far

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Abstrak

Keywords:

*Alwasliyah, Politics,
Pancasila, Moderate
Islamism*

Aljam'iyatul Washliyah adalah organisasi Islam di Sumatera Utara yang mempunyai potensi massa, amal usahanya dan sosial keagamaan yang masih diabaikan oleh banyak peneliti. Studi ini mengungkap perkembangan pemikiran politik Alwasliyah di Indonesia. Proses penggalan data dilakukan dari studi dokumen dan wawancara dengan tokoh penting di organisasi ini. Pemikiran politik Alwasliyah terus mengalami perkembangan. Awalnya Aljam'iyatul Wasliyah lahir sebagai organisasi non-politik karena bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial. Pada masa Orde Lama, Alwasliyah berijtihad untuk menjadi anggota istimewa Partai Masyumi. Kemudian, bergerak mendukung Parmusi dan memiliki hubungan ideologis dengan PPP. Studi ini melihat bahwa paham politik Alwasliyah adalah islamisme moderat. Organisasi ini mendukung Islam sebagai dasar negara dengan menolak Pancasila. Akan tetapi, lambat laun organisasi ini menerima Pancasila sebagai ideologi yang final. Tulisan ini berkontribusi dalam melihat bagaimana dinamika politik sebuah organisasi keagamaan mengakomodasi Pancasila.

Abstract

Aljam'iyatul Washliyah is an Islamic organization in North Sumatra that has mass potential, business charity and social religion which is still ignored by many researchers. This study reveals the development of Alwasliyah's political thought in Indonesia. The process of extracting data is carried out from document studies and interviews with important figures in this organization. Alwasliyah's political thinking continues to experience development. Aljam'iyatul Wasliyah was born as a non-political organization because it was engaged in education, preaching and social charity. During the Old Order, Alwasliyah tried

to become a special member of the Masyumi Party. Then, move to support Parmusi and have an ideological relationship with PPP. This study argues that Alwashliyah's political understanding is moderate Islamism. This organization supports Islam as the basis of the state by rejecting Pancasila. However, gradually this organization accepted Pancasila as the final ideology. This paper contributes to seeing how the political dynamics of a religious organization accommodate Pancasila

Pendahuluan

Secara historis, organisasi-organisasi Islam yang lahir di Indonesia turut berperan secara aktif dalam memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan yang diraih pada tahun 1945. Hal menarik yang telah diungkap banyak peneliti adalah masalah hubungan organisasi Islam di Indonesia dengan politik. Nahdlatul Ulama (NU) lahir sebagai organisasi sosial keagamaan tetapi kemudian menjadi partai politik dan akhirnya kembali menjadi organisasi sosial keagamaan.¹ Sebagaimana NU, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) juga beralih status dari sebuah organisasi sosial keagamaan di awal berdirinya kemudian menjadi partai politik dan akhirnya menjadi organisasi non-partai.² Muhammadiyah tidak pernah menjadi partai politik, tetapi pernah menjadi anggota istimewa Partai Masyumi. Beberapa tokoh Muhammadiyah menjadi tonggak pendiri Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) di era Orde Baru, serta Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Matahari Bangsa di era Reformasi.³ Beberapa organisasi Islam lain mengalami hal serupa, dari menjadi anggota istimewa Partai

¹ Ali Munhanif, "The Khittah of 1926 Reexamined: Views of the NU in Post-Cipasang Congress," *Studia Islamika* 3, no. 2 (1996), 85-119.; Greg Barton and Andree Feillard, "Nahdlatul Ulama, Abdurrahman Wahid and Reformation: What Does NU's November 1997 National Gathering Tell Us?," *Studia Islamika* 6, no. 1 (1999), 1-40.; Robin Bush, "Redefining 'Political Islam' in Indonesia: Nahdlatul Ulama and Khittah '26," *Studia Islamika* 7, no. 2 (2000), 62-86.

² Alaidin Koto, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI): Sejarah Pemikiran Keagamaan dan Pemikiran Politik (1945-1970)* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

³ Suaidi Asyari, "Ijtihad-Based Politics: The Muhammadiyah Political Participation in Post-Soeharto," *Studia Islamika* 15, no. 1 (2008), <http://kabarwashliyah.com>, 25-97.; Amika Wardana and Syahrul Hidayat, "The Multiplicity of Muhammadiyah's Political Engagement in Indonesia's DPD Election," *Studia Islamika* 26, no. 1 (2019), 75-112.

Masyumi lalu akhirnya konsisten menjadi organisasi sosial keagamaan. Bisa disimpulkan bahwa organisasi-organisasi Islam di Indonesia terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam dunia politik di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai saat ini.

Aljam'iyatul Washliyah, biasa disebut Alwashliyah, merupakan organisasi Islam terbesar di Sumatera Utara. Organisasi ini didirikan oleh kaum pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli dan Madrasah Hasaniyah di Medan, 30 November 1930.⁴ Sebelum era kemerdekaan, Alwashliyah telah berkembang pesat di Keresidenan Sumatera Timur yang saat ini merupakan wilayah pesisir timur Sumatera Utara dan dahulu merupakan basis kekuasaan beberapa kesultanan Melayu. Di era yang sama, organisasi ini bahkan telah mulai meluaskan pengaruhnya di Keresidenan Tapanuli, Aceh, dan Riau. Sampai saat ini, Alwashliyah relatif berhasil menjadi organisasi Islam berskala nasional, meskipun amal usahanya lebih banyak tersebar di Sumatera Utara, khususnya di wilayah bagian timur propinsi tersebut. Di luar Sumatera Utara, Alwashliyah memiliki amal usaha dalam bidang pendidikan di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah, meskipun jumlahnya tidak signifikan.⁵ Madrasah-madrasah Alwashliyah pernah dikenal sebagai madrasah yang mengutamakan tradisi kitab kuning.⁶ Potensi konstituen Alwashliyah memang belum sebanyak pengikut NU dan Muhammadiyah di level nasional. Meskipun demikian, keberadaan mereka tentu tidak bisa diabaikan dan menarik perhatian serta merupakan realitas sosial. Di Sumatera Utara, potensi massa Alwashliyah sangat diperhitungkan. Selain Alwashliyah, ada satu organisasi Islam yang juga lahir di Sumatera Timur yaitu Alittihadiah.⁷

⁴ M. Husein Abd Karim, ed., *21 Tahun Al Dj. Washlijah 30 Nov. 1930-30 Nov. 1951* (Medan: Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah, 1951).

⁵ Ja'far, *Ikatan Pelajar Alwashliyah: Gerakan, Identitas dan Ideologi Pelajar Muslim di Nusantara 1953-2017* (Medan: Perdana Publishing, 2018), 10-14.

⁶ Ja'far, "Khazanah Kitab Kuning di Madrasah Aljam'iyat Alwashliyah," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Althariqah* 2, no. 2 (2017): 124-134.

⁷ Dja'far Siddik and Ja'far, *Alittihadiah: Delapan Dasawarsa Menerangi Nusantara* (Medan: Perdana Publishing, 2017).

Dalam tataran politik, Alwashliyah tidak mengikuti jejak NU atau Perti untuk menjadi partai politik. Dari awal berdiri sampai saat ini Alwashliyah tidak pernah menjadi partai politik. Hanya saja, organisasi ini pernah menjadi salah satu anggota istimewa Partai Masyumi di era Orde Lama. Semasa Orde Baru, pimpinan Alwashliyah mendukung dan menandatangani piagam deklarasi pendirian Parmusi. Lalu, tokoh utama organisasi ini cenderung menjadi politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), meskipun sebagian ada juga yang bergabung dengan Golkar. Tetapi, sejak tahun 1986 Alwashliyah sebagai organisasi memilih sikap independen dari masa Orde Baru sampai saat ini, meskipun para kadernya tersebar di berbagai partai politik, baik partai Islam maupun partai nasionalis-religius.

Alwashliyah di awal berdirinya mendukung paham Islam politik, tetapi kemudian menerima Pancasila dan menegaskan NKRI sebagai sesuatu yang final. Pada awalnya, kader-kader Alwashliyah di era Orde Lama merupakan pendukung fanatik partai Islam sehingga cenderung eksklusif, tetapi kemudian di era Orde Baru sampai Reformasi kader-kader Alwashliyah lebih bersikap inklusif dan cenderung pragmatis dalam memberikan dukungan terhadap partai politik. Fakta ini menarik diungkap.

Studi ini akan menelaah perkembangan pemikiran politik dalam organisasi Alwashliyah. Studi ini merupakan studi sejarah pemikiran politik Islam, sehingga yang akan ditelaah dalam kajian adalah pemikiran politik Alwashliyah selama tiga masa: Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Oleh karena itu, pendekatan sejarah digunakan untuk menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Studi ini meminjam teori Kuntowijoyo⁸ tentang lima tahap penulisan sejarah, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (dokumen tertulis, wawancara dan hasil observasi), verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi: analisis dan sintesis, dan penulisan (historiografi). Dalam studi ini, sumber primer menjadi sedemikian diutamakan demi objektivitas kajian.

⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 69-82.

Dalam memetakan pemikiran politik Alwashliyah ini, penulis menggunakan teori relasi agama dan politik. Paling tidak ada tiga pola hubungan agama (Islam) dan politik, yaitu integralistik (integrasi agama dan negara), sekularistik (pemisahan negara dari agama), dan simbiotik (agama dan negara dapat berhubungan secara simbiotik).⁹ Dari teori ini, akan ditentukan posisi pemikiran politik organisasi Alwashliyah di antara tiga pola tersebut, dan apakah keduanya konsisten dalam posisi tersebut.

Sejarah, Fikih dan Akidah Alwashliyah

Aljam'iyatul Washliyah, didirikan oleh sejumlah pelajar Muslim di Medan yang berasal dari suku Mandailing. Mereka, seperti Ismail Banda, Abdurrahman Syihab, M. Arsjad Thalib Lubis, dan M. Yusuf Ahmad Lubis, merupakan pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT)¹⁰ dan Madrasah Hasaniyah. MIT adalah madrasah yang didirikan oleh orang-orang perantau Mandailing, dan belakangan dipimpin oleh Syekh Muhammad Yunus yang merupakan murid Syekh 'Abd Alqadir Almandili di Makkah.¹¹ Sedangkan Madrasah Hasaniyah merupakan madrasah yang didirikan oleh Syekh Hasan Maksom, seorang ulama Melayu yang menduduki posisi sebagai ulama Kesultanan Deli dan merupakan murid beberapa ulama Haramain terutama Syekh Ahmad Khathib Alminangkabawi.¹² Kepada kedua ulama ini, para pendiri Alwashliyah mendapatkan ilmu-ilmu agama dalam tradisi Sunni.

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 235-236.

¹⁰ Selanjutnya ditulis MIT. Ulasan detil dalam Muaz Tanjung, *Maktab Islamiyah Tapanuli 1918-1942: Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam Awal Abad ke-20 di Medan* (Medan: IAIN Press, 2012).

¹¹ Ja'far, "Tarekat dan Gerakan Sosial Keagamaan Shaykh Hasan Maksom," *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2015), 269-293.

¹² Biografi Syekh Hasan Maksom dalam Matu Mona, *Rivajat Penghidoepan Aljadil Toe'an Sjech Hasan Ma'soem* (Medan: Sjarikat Tapanoeli, 1355).

Pelajar-pelajar senior MIT bukan merupakan bagian dari organisasi pelajar lain. Pada tahun 1928, mereka mendirikan perkumpulan pelajar MIT yang tujuannya adalah *debating club* untuk mendiskusikan persoalan-persoalan agama dan masyarakat. Perkumpulan ini mengadakan pertemuan seminggu sekali yaitu setiap malam Jumat dengan tempat yang berpindah-pindah.¹³

Chalidjah¹⁴ menyatakan bahwa meskipun Jong Islamieten Bond (JIB)¹⁵ memiliki cabang di Medan, akan tetapi para pelajar MIT tidak menjadi anggota organisasi pelajar sekolah Belanda tersebut. Penyebabnya adalah mereka tidak mampu menggunakan bahasa Belanda yang menjadi pengantar dalam organisasi tersebut. Akhirnya, mereka membentuk MIT lantaran ingin berdiri sejajar dengan para pelajar muslim yang bergabung dengan JIB.

Dua tahun berdiri, sejumlah anggota perkumpulan pelajar MIT merasa tidak puas dengan kegiatan perkumpulan yang terbatas. Sebagian mereka berharap perkumpulan ini dapat memperluas usaha-usaha organisasi dan memperkuat gerakan organisasi. Sebab itulah, pada Oktober 1930, para pengurus perkumpulan pelajar ini mengadakan rapat di rumah M. Yusuf Ahmad Lubis dan dihadiri antara lain oleh Abdurrahman Syihab, Adnan Nur, dan M. Isa. Pertemuan pertama ini tidak menghasilkan keputusan, sehingga diadakan pertemuan kedua yang dipimpin oleh Abdurrahman Syihab sebagaimana pada pertemuan pertama, dan dihadiri sejumlah pelajar senior salah satunya Ismail Banda. Pertemuan kedua ini memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi yang lebih besar dan lebih luas usahanya. Untuk memperkuat keputusan ini, mereka kembali mengadakan pertemuan ketiga yang melibatkan ulama-ulama, guru-guru, dan para pelajar. Akhirnya, pada tanggal 26 Oktober 1930 di Maktab Islamiah Tapanuli, diadakan pertemuan besar yang dihadiri oleh ulama,

¹³ Nukman Sulaiman, ed., *Peringatan 1/4 Aldjamijatul Washlijah Abad* (Medan: Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah, 1956), 36.

¹⁴ Chalidjah Hasanuddin, *Aljam'iyatul Washlijah 1930-1942: Api dalam Sekam di Sumatera Timur* (Bandung: Pustaka, 1988), 34-35.

¹⁵ Selanjutnya ditulis BIJ

guru, dan pelajar. Pada pertemuan penting ini, Ismail Banda, M. Arsjad Thalib Lubis, dan Kular memberikan penjelasan tentang organisasi yang akan didirikan. Setelah diskusi digelar, diputuskan untuk mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan “memajukan, mementingkan, dan menambah tersiarnya agama Islam.” Sebagai pelajar yang masih menghormati guru, mereka meminta Syekh Muhammad Yunus untuk memberikan sebuah nama bagi organisasi yang mau didirikan. Akhirnya, Syekh Muhammad Yunus memberi nama “Al Jam’iyatul Washliyah yang artinya “Perhimpunan yang menghubungkan dan mempertalikan.”¹⁶

Empat hari kemudian, 30 November 1930, diadakan pertemuan di gedung Maktab Islamiyah Tapanuli. Ismail Banda yang merupakan pelajar tertua dipercaya sebagai pemimpin rapat peresmian organisasi Alwashliyah. Ia menjelaskan bahwa cita-cita pendirian organisasi ini adalah menunaikan tuntutan agama Islam. Pertemuan dan penjelasan pengurus sementara telah memuaskan para peserta yang hadir, dan pada saat itulah Al Jam’iyatul Washliyah resmi didirikan.¹⁷

Para pendiri Alwashliyah merencanakan akan mengadakan taman bacaan, membuka pelajaran-pelajaran, mengadakan *tabligh* agama Islam, menerbitkan majalah, dan menjawab masalah-masalah agama Islam.¹⁸ Pada masa-masa awal, Alwashliyah memberikan perhatian terhadap persoalan pendidikan di tengah sulitnya kaum pribumi memperoleh pendidikan agama Islam di era kolonial Belanda yang menerapkan sistem pendidikan yang sekuler. Sampai akhirnya Alwashliyah memilih empat bidang sebagai amal usahanya yaitu pendidikan, dakwah, amal sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Alwashliyah berdedikasi terhadap kemajuan bangsa melalui jalur pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi.¹⁹

¹⁶ Nukman Sulaiman, *Peringatan 1/4 Aldjamijatul Washlijah Abad*, 36-38.

¹⁷ Nukman Sulaiman, ed., *Peringatan 1/4 Aldjamijatul Washlijah Abad*, 38.

¹⁸ Nukman Sulaiman, ed., *Peringatan 1/4 Aldjamijatul Washlijah Abad*.

¹⁹ Azizy Ahmad Hamim, *Al Jam’iyatul Washlijah Dalam Kancah Politik Indonesia* (Banda Aceh: PeNA, 2016).

Dalam aspek ideologi, Alwashliyah merupakan organisasi yang berasaskan Islam. Tetapi, sebagai alumni MIT dan Madrasah Hasaniyah yang berafiliasi dengan mazhab Sunni, para pendiri Alwashliyah akhirnya memutuskan bahwa Alwashliyah sebagai organisasi yang menganut mazhab Syafi'i dalam bidang hukum Islam dan mazhab Ahlussunnah Waljamaah dalam bidang teologi Islam.²⁰

Dalam *Tafsir Anggaran Dasar Al Djamijatul Washlijab*,²¹ disebutkan bahwa arti berasas Islam adalah semua usaha organisasi harus didasarkan pada Islam dan tidak boleh keluar darinya. Para pemimpin, pengurus, dan anggota Alwashliyah harus menyesuaikan usaha yang akan dijalankan organisasi dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan arti bermazhab Syafi'i adalah bahwa semua usaha yang dijalankan atas nama organisasi harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam mazhab Syafi'i, dan segala pertikaian yang terjadi dalam organisasi Alwashliyah harus diselesaikan menurut ketentuan hukum Islam dalam mazhab Syafi'i. Dengan demikian, mazhab Syafi'i merupakan mazhab organisasi, sehingga semua persoalan diselesaikan menurut ketentuan mazhab ini. Meskipun demikian, setiap anggota organisasi dibebaskan untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmunya.

Ada tiga alasan mengapa mazhab Syafi'i dipilih sebagai mazhab organisasi. *Pertama*, semua pengurus dan anggota Alwashliyah menganut mazhab Syafi'i. *Kedua*, mayoritas penduduk Sumatera Timur bermazhab Syafi'i. Ketiga, perselisihan paham antar ulama di Sumatera Timur sangat kuat. Mazhab Syafi'i disepakati sebagai mazhab organisasi agar bisa menjadi panduan dalam menentukan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi serta menyelesaikan seluruh pertikaian yang terjadi. Artinya,

²⁰ Ja'far, "Peran Aljam'iyatul Washliyah dalam Merevitalisasi Madhdhab Shafi'i di Era Kontemporer," *Justicia Islamica* 13, no. 1 (2016), 1-29.; Ja'far, "Respons Dewan Fatwa Aljam'iyatul Washliyah terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global," *Almanahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 (2016), 97-118.

²¹ Nukman Sulaiman, *Peringatan 1/4 Aldjamijatul Washlijab Abad*, 350-351.

mazhab Syafi'i dipilih Alwashliyah untuk bisa menjaga persatuan dalam perkumpulan. Sedangkan mazhab Ahlussunnah Waljamaah dijadikan sebagai pedoman berakidah adalah karena mazhab ini diyakini sebagai golongan yang selamat dari neraka dan menjadi penghuni surga karena keyakinannya sesuai dengan jalan Nabi Muhammad Saw., para sahabat, dan orang-orang saleh terdahulu.²² Ulama-ulama dan lembaga-lembaga pendidikan Alwashliyah berkontribusi dalam mengembangkan dan melestarikan Islam menurut mazhab Syafi'i dan Ahlussunnah Waljamaah. Keduanya menjadi agen Alwashliyah dalam mengembangkan mazhab Sunni di Nusantara.²³

Alwashliyah dan Islam Politik di Era Orde Lama

Dalam hubungan politik dan negara, sudah sejak lama Islam mengalami ketegangan dengan menemukan jalan buntu di masa Orde Lama. Para pemimpin cenderung berpandangan bahwa partai-partai politik dan kekuatan Islam politik lainnya sebagai pesaing kekuasaan yang berpotensi merobohkan landasan negara yang nasionalis. Dengan alasan inilah, penguasa Orde Lama berupaya untuk melemahkan dan menjinakkan kekuatan-kekuatan Islam politik.²⁴

Alwashliyah lahir bukan sebagai partai politik, melainkan sebagai organisasi sosial keagamaan. Tujuan pertama sekali organisasi ini didirikan adalah memajukan, mementingkan dan menambah tersiarnya agama Islam.²⁵ Demi mencapai tujuan, organisasi ini memilih tiga bidang sebagai

²² Karim, *21 Tahun Al Dj. Washlijah 30 Nov. 1930-30 Nov. 1951*, 61-67.

²³ Ja'far, *Tradisi Intelektual Al Washlijah: Biografi Ulama Kharismatik dan Tradisi Keulamaan* (Medan: Perdana Publishing-CAS, 2015). Lihat juga. Ja'far, *Aldjam'iyatul Washlijah: Cita-cita Keislaman dan Keindonesiaan* (Banda Aceh: PeNA, 2018), 1-9.

²⁴ Gun Gun Heryanto, *Literasi Politik Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*, ed. Muhammad Hanifuddin, Pertama. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 328.

²⁵ Udin Sjamsuddin, *Chutbah Pengurus Besar Memperingati Ulang Tahun Aldjam'iyatul Washlijah Seperempat Abad (30 November 1930-30 November 1955)* (Medan: Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah, 1955), 4.

amal usahanya, yaitu pendidikan, dakwah dan amal sosial. Dalam rentang tahun antara 1930 sampai 1951, Alwashliyah relatif sukses mendirikan madrasah dan sekolah yang tersebar di Keresidenan Sumatera Timur, Tapanuli dan Aceh dengan jumlah 440 unit.²⁶ Selain itu, Alwashliyah mendirikan beberapa organisasi bagian yaitu Puteri (Muslimat) Alwashliyah, Pemuda (Gerakan Pemuda) Alwashliyah, Pandu Alwashliyah dan Angkatan Puteri Alwashliyah. Keempat organisasi ini berfungsi semacam lembaga pendidikan non formal dan merupakan organisasi bagian Alwashliyah yang bertujuan untuk menempa jiwa kepemimpinan kaum wanita, pemuda dan pelajar sebagai pewaris organisasi di masa mendatang. Perhatian Alwashliyah terhadap pendidikan, selain dakwah dan amal sosial, sangat intens.

Alwashliyah lebih memilih untuk berdedikasi dalam bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial menunjukkan bahwa Alwashliyah tidak memilih jalur politik untuk mencapai cita-cita Islam secara khusus. Sebagaimana diakui oleh salah seorang pendirinya, M. Arsjad Thalib Lubis, Alwashliyah lebih memilih lapangan pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia ketimbang lapangan politik disertai kesadaran bahwa kedua lapangan tersebut sama-sama penting dalam memperjuangkan cita-cita Islam.²⁷ Tuan Arsjad, panggilan bagi M. Arsjad Thalib Lubis, mengemukakan bahwa Alwashliyah memilih memperjuangkan cita-cita Islam melalui lapangan pembangunan dan pembinaan umat Islam. Pemilihan ini tidak bermakna bahwa Alwashliyah menilai lapangan politik tidak penting. Menurutnya, kedua lapangan ini memiliki hubungan erat dan harus mendapatkan perhatian istimewa. Alwashliyah menyadari bahwa perjuangan politik akan kandas di tengah jalan jika pembangunan dan pembinaan organisasinya diabaikan. Hukum Islam tidak akan bisa ditegakkan pada level masyarakat dan negara jika umat Islam tidak

²⁶ Karim, *21 Tahun Al Dj. Washlijah 30 Nov. 1930-30 Nov. 1951*, 11.

²⁷ Nukman Sulaiman, *Peringatan 1/4 Aldjamijatul Washlijah Abad*, 18.

cinta dan bodoh tentang agamanya. Dengan demikian, strategi yang dipilih Alwashliyah agar cita-cita umat Islam dalam lapangan politik bisa dicapai adalah dengan membangun dan membina umat Islam melalui jalur pendidikan, dakwah dan amal sosial. Harapannya, ajaran Islam bisa diimplementasikan dengan sempurna manakala umat Islam cinta dan paham tentang ajaran agamanya yang sempurna.²⁸ Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Alwashliyah memiliki perhatian terhadap dunia politik, tetapi tidak langsung memilih bidang politik sebagai perjuangan pokok sebagaimana partai politik Islam.

Alwashliyah menilai bahwa cita-cita Islam memang bisa diwujudkan dengan ikut berjuang di lapangan politik. Artinya, organisasi ini sebenarnya tidak abai terhadap masa depan politik Islam dan menilai bahwa umat Islam harus menang secara politik. Ideologi ini sebenarnya lahir dari keyakinan pendirinya bahwa Islam merupakan agama yang lurus dan sempurna sebagaimana dijelaskan dalam *Tafsir Anggaran Dasar Alwashliyah*.²⁹ Alwashliyah memaknai Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur masalah akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, tetapi juga politik yang meliputi aturan-aturan kenegaraan seperti susunan pemerintahan, hak-hak warga negara, kehakiman, aturan perang, dan lain-lain.³⁰

Nukman Sulaiman, ideolog lain Alwashliyah, dalam karyanya yang berjudul *Alwashliyah* yang sejak 1967 menjadi referensi bagi guru dan pelajar Alwashliyah semakin menunjukkan bahwa Alwashliyah menaruh perhatian terhadap kemenangan umat Islam dalam bidang politik, meskipun tidak secara langsung mengambil jalur politik sebagai perjuangan pokoknya. Sulaiman menunjukkan bahwa perhatian tersebut tidak bisa dilepaskan dari makna Islam sebagai asas organisasi. Menurutnya, Alwashliyah menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna yang tidak saja membahas masalah akidah, syariah dan akhlak, tetapi juga meliputi masalah sosial, ekonomi, dan politik.

²⁸ Nukman Sulaiman, *Peringatan 1/4 Aldjamijatul Washlijah Abad*, 18-19.

²⁹ Karim, *21 Tabun Al Dj. Washlijah 30 Nov. 1930-30 Nov. 1951*, 62.

³⁰ Karim, *21 Tabun Al Dj. Washlijah 30 Nov. 1930-30 Nov. 1951*, 63.

Salah satu tujuan Islam adalah memegang kekuasaan dalam pemerintahan. Artinya, salah satu maksud melaksanakan tuntutan agama Islam yang merupakan tujuan selanjutnya Alwashliyah adalah meraih kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Hanya saja, Alwashliyah sebagai organisasi menilai bahwa lapangan pendidikan, dakwah dan amal sosial masih menjadi skala prioritas dan harus didahulukan ketimbang politik, dan menyerahkan perjuangan politik Islam kepada partai-partai Islam atau kader-kader Alwashliyah secara pribadi.³¹ Perjuangan Alwashliyah lebih ditumpukan pada peningkatan kualitas umat Islam melalui jalur pendidikan, dakwah dan amal sosial. Menariknya, Sulaiman menyebutkan jika partai-partai Islam tidak lagi bisa dipercaya untuk memperjuangkan tuntutan agama Islam dalam bidang politik, maka Alwashliyah bisa mempertimbangkan untuk berjuang secara langsung dalam bidang politik.³²

Paham bahwa Islam dan politik (negara) merupakan satu kesatuan bisa dilihat dalam *Tafsir Anggaran Dasar* Pemuda Alwashliyah yang sekarang bernama Gerakan Pemuda Alwashliyah. Organisasi pemuda Alwashliyah ini didirikan di Medan pada tahun 1941, dan meyakini bahwa syariat Islam tidak bisa dipisah-pisahkan dengan negara.³³ Keyakinan Alwashliyah bahwa Islam merupakan agama yang lurus dan sempurna sehingga juga mengatur urusan politik dan kenegaraan sedemikian diyakini oleh para pengurusnya terutama di era Orde Lama. Sebab itulah, kebijakan-kebijakan politik Alwashliyah mengacu kepada paham Alwashliyah tentang politik.

Pada Era kemerdekaan, tepatnya setelah teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, seluruh potensi Alwashliyah dikerahkan untuk mempertahankan kemerdekaan dengan keyakinan bahwa umat Islam di Indonesia harus menjadi bangsa yang merdeka. Penjajah Belanda dan Jepang yang berasal dari kaum kafir harus dilawan. Itulah mengapa pada tanggal

³¹ Nukman Sulaiman, *Alwashliyah* (Medan: Pustaka Azizi, 1967), 8.

³² Nukman Sulaiman, *Alwashliyah*, 10.

³³ Nukman Sulaiman, *Peringatan 1/4 Aldjamiatul Washlijah Abad*, 366-367.

9 Oktober 1945, Alwashliyah mengirimkan pernyataan dukungan kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera bahwa “Al Jam’iyatul Washliyah turut mempertahankan Republik Indonesia.” Kelompok pemuda Alwashliyah juga menerbitkan majalah khusus, yakni *Pedoman Pemuda* yang berfungsi sebagai pengobar semangat perjuangan, urgensi perang sabil, dan mati syahid bagi para pejuang kemerdekaan, dan menerbitkan buku *Penuntun Perang Sabil* karya M. Arsjad Thalib, meskipun akhirnya buku itu dilarang beredar oleh tentara Belanda.³⁴

Pada tanggal 28 Oktober 1945, Alwashliyah mengeluarkan tiga perintah untuk Pemuda Alwashliyah dan Pandu Alwashliyah. *Pertama*, Pemuda Alwashliyah dan Pandu Alwashliyah harus menjalin kerjasama dengan seluruh gerakan pemuda dan kepanduan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. *Kedua*, Pemuda Alwashliyah dan Pandu Alwashliyah bekerjasama untuk mengawal seluruh tempat yang perlu dijaga. *Ketiga*, Pemuda Alwashliyah dan Pandu Alwashliyah harus bersedia memberikan pengorbanan jika kondisi menghendaki pengorbanan.³⁵ Terakhir, Majelis Alfatwa (sekarang Dewan Fatwa) mengeluarkan putusan hukum tentang urgensi membela tanah air. Majelis Alfatwa mengeluarkan dua fatwa, yaitu; wajib atas tiap-tiap umat Islam di Indonesia menolak kedatangan orang-orang Belanda dan pembantu-pembantunya yang hendak berkuasa di Indonesia, dan orang Islam yang mati dalam pertempuran menolak Belanda beserta pembantu-pembantunya, apabila meninggal dalam pertempuran dengan niat menegakkan agama Islam maka disebut *syahid fi sabilillah*. Fatwa ini dikeluarkan dalam Kongres ke-V Alwashliyah di Pematang Siantar, 30 November-2 Desember 1945.³⁶

Selain itu, Alwashliyah juga menolak keputusan politik kesultanan Melayu yang hendak mendirikan Negara Sumatera Timur dengan

³⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah Ulama-ulama Terkemuka di Sumatera Utara* (Medan: MUI Sumatera Utara, 1983), 348.

³⁵ Nukman Sulaiman, *Peringatan 1/4 Aldjamijatul Washlijah Abad*, 126, 129.

³⁶ Nukman Sulaiman, *Peringatan 1/4 Aldjamijatul Washlijah Abad*.

dukungan Belanda dan tentara Sekutu, meskipun Sultan Melayu Deli banyak berjasa kepada Alwashliyah. Organisasi ini menghendaki Sumatera Timur tetap bergabung dengan NKRI. Dalam Kongres ke-VII Alwashliyah di Medan, 8-11 April 1950, Alwashliyah memutuskan tiga hal, *pertama*, menuntut pembubaran NST dan seluruh Sumatera Timur dikembalikan kepada Republik Indonesia. *Kedua*, kaum Muslim tidak boleh menghalangi usaha mengembalikan Sumatera Timur kepada Republik Indonesia. *Ketiga*, hak-hak keagamaan yang dikuasakan kepada Jawatan Agama RI masih tetap berlaku di seluruh Sumatera Timur. Keputusan ini disahkan oleh Abdurrahman Syihab dan Udin Sjamsuddin sebagai pimpinan PB Alwashliyah.³⁷

Demi mencapai kemenangan politik umat Islam di era kemerdekaan Indonesia, Alwashliyah tidak meniru ijihad politik NU dan Perti dengan menjadi partai politik, tetapi Alwashliyah lebih memilih menjadi anggota istimewa Partai Masyumi. Menjelang pemilihan umum pertama tahun 1955, Alwashliyah pernah mengeluarkan *kbittab* dan instruksi umum yang diterbitkan pada tanggal 4 Juli 1955, yang berisi di antaranya “tidak mengizinkan anggota (keluarga) Alwashliyah untuk memilih tanda gambar yang tidak bercita-cita Islam.”³⁸ Menjelang pemilihan anggota Majelis Konstituante, Alwashliyah mengadakan Konferensi Daerah di Medan pada tanggal 16 Oktober 1955 dan mengeluarkan empat seruan. *Pertama*, seluruh keluarga besar Alwashliyah dan simpatisan Masyumi agar tetap memilih tanda gambar Bulan Bintang Masyumi. *Kedua*, kaum Muslim yang belum masuk partai hendaknya memilih partai-partai Islam. *Ketiga*, partai-partai Islam dan organisasi-organisasi Islam harus mampu bekerjasama dan menyatukan langkah dalam menghadapi Pemilu pemilihan anggota Konstituante. *Keempat*, hendaknya mempertanggungjawabkan dan menyerahkan usaha partai dan organisasi Islam dalam melaksanakan Pemilu hanya kepada Allah Swt.³⁹

³⁷ Nukman Sulaiman, *Peringatan 1/4 Aldjamijatul Washlijah Abad*, 165.

³⁸ Nukman Sulaiman, *Peringatan 1/4 Aldjamijatul Washlijah Abad*, 216-217.

³⁹ Nukman Sulaiman, *Peringatan 1/4 Aldjamijatul Washlijah Abad*, 226.

Pendiri Alwashliyah bahkan berhasil menjadi anggota legislatif di level nasional dan lokal. Di level nasional, empat tokoh Alwashliyah menjadi anggota Majelis Konstituante yaitu M. Arsjad Thalib Lubis, Adnan Lubis, Bahrum Jamil, dan M. Ali Hanafiah Lubis. Satu orang tokoh Alwashliyah menjadi anggota DPR RI yaitu Udin Sjamsuddin. Abdurrahman Sjihab pernah menjadi salah satu anggota pengurus pusat Partai Masyumi, sedangkan M. Arsjad Thalib Lubis dan Adnan Lubis menjadi anggota Dewan Syuro Partai Masyumi. Berapa tokoh Alwashliyah menjadi pengurus Partai Masyumi di Sumatera Utara dan anggota legislatif dari Fraksi Masyumi.

Gagasan Islam politik Alwashliyah, menegaskan bahwa pendukung Partai Masyumi menekankan betapa negara harus didasari kepada syariat Islam, dan gagasan ini menjadi faktor mengapa Alwashliyah mendukung Partai Masyumi. M. Arsjad Thalib Lubis menulis buku *Ilmu Fiqih* yang sangat dipengaruhi oleh karya Al-mawardi yang berjudul *Alabkam Alsulthaniyyah* ketika membahas masalah hukum *Imam Ala'zham*. Dalam buku itu, ia menjelaskan bahwa sebuah negara Islam wajib (*fardu kifayah*) memilih kepala negara yang adil dengan tugas memelihara dan menjalankan syariat Islam. Kepala negara harus menjalankan pemerintahan dengan sistem Islam (*nizham islami*).⁴⁰ Adnan Lubis dalam artikelnya '*Sistem Tata Negara Islam*' yang diterbitkan dalam majalah *Alislam* pada tahun 1955 menegaskan bahwa "Islam itu adalah satu negara. Umat Islam harus menegakkan negara Islam sebagai wujud dari penghormatan dan keyakinan terhadap ajaran agama." Nukman Sulaiman menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang meliputi sifat-sifat sosial, ekonomi dan politik. Sebab itu, menurut Nukman, dasar Islam meliputi tujuan mengatur masyarakat yang baik (sosial), memperbaiki harkat hidup manusia (ekonomi), dan memegang kekuasaan dalam pemerintahan.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Arsjad Thalib Lubis, *Ilmu Fiqih* (Medan: Islamiyah, 1982), 200-204.

⁴¹ Nukman Sulaiman, *Peringatan 1/4 Aldjamijatul Washlijah Abad*, 8-10.

Memasuki penghujung Orde Lama, Alwashliyah menjadi salah satu ormas Islam terdepan dalam melawan gerakan komunis. Alwashliyah bersama para ulamannya menolak PKI dan Komunisme karena menilai bahwa paham tersebut bertentangan dengan Islam, Pancasila dan berbahaya bagi keutuhan NKRI. Yusuf Ahmad Lubis yang merupakan salah seorang pendiri Alwashliyah pernah menulis buku yang berjudul *Bahaya Komunis*.⁴² Dalam *Wijbah Alwashliyah* yang ditulis oleh Bahari Emde (murid M. Arsjad Thalib Lubis) ditegaskan bahwa agama harus menjadi sumber dan unsur mutlak bagi hukum yang berlaku.⁴³ Di Sumatera Utara, tokoh-tokoh Alwashliyah dari kelompok tua sampai kelompok muda ikut menghadang dan melawan gerakan pemberontakan PKI.

Dalam Muktamar Alwashliyah di Pekanbaru tahun 1978, Alwashliyah mengesahkan *Wijbah Alwashliyah* yang disusun oleh Bahari Emde. Di dalamnya terdapat beberapa pokok bahasan tentang masalah konsep kenegaraan, yaitu; *Pertama*, politik kenegaraan harus dapat menciptakan keadilan dan kemakmuran di bawah lindungan *rahmah* dan *maghfirah* (Ilahi). *Kedua*, agama harus menjadi sumber dan unsur mutlak bagi hukum yang berlaku. *Ketiga*, kemerdekaan beragama bagi setiap rakyat harus terjamin. *Keempat*, anti agama dan anti Tuhan merupakan unsur yang sangat berbahaya. *Kelima*, antara bangsa di dunia harus mendasari hubungannya dengan *ta'aruf* yaitu saling mengenal dan memahami.⁴⁴

Pandangan Alwashliyah tentang relasi erat antara Islam dan politik begitu kuat, sehingga Alwashliyah memilih menjadi anggota istimewa Partai Masyumi dan di era berikutnya. Alhasil, pasca pembubaran Partai Masyumi dan memasuki era Orde Baru, ada keinginan kuat dari eks politisi Masyumi untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi meskipun tidak

⁴² Ramli Abdul Wahid, *Peranan Islam dalam Menghadapi Era Globalisasi Sekuler* (Medan: Manhaji, 2016).

⁴³ Bahari Emde, "Wijbah Alwashliyah," in *Potret Histori, Edukasi dan Filosofi*, ed. Ja'far (Medan: Perdana Publishing-CAS, 2012).

⁴⁴ Bahari Emde, "Wijbah Alwashliyah," in *Potret Histori, Edukasi dan Filosofi*, 227-228.

direstui oleh Presiden Soeharto. Di era awal Orde Baru, Alwashliyah tidak berafiliasi dengan partai Islam manapun, kendati tokoh-tokoh teras Alwashliyah terlibat aktif dalam pendirian Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi yang diinisiasi oleh eks politisi Masyumi, khususnya di Sumatera Utara. Udin Sjamsuddin, M. Arsjad Thalib Lubis dan Adnan Benawy merupakan tiga di antara tokoh utama Alwashliyah yang terlibat dalam pendirian Parmusi di Sumatera Utara.

Sampai saat ini, masih banyak tokoh Alwashliyah masih bersikukuh dengan pandangan bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari agama.⁴⁵ Dalam hal ini, Ramli Abdul Wahid⁴⁶ mengusung gagasan teologisasi politik, yang berarti bahwa politik harus dilandasi dengan keyakinan teologis dan kesalahan berpolitik mengakibatkan dosa. Dengan landasan teologis, perjuangan partai akan jujur, *fair*, bersih, dan akan terhindar dari tindakan anarkis dan praktik-praktik amoral lainnya. Meskipun istilah ini bukan konsep resmi organisasi, karena tidak disahkan dalam forum muktamar, namun mengingat posisi Ramli sebagai Ketua Dewan Fatwa Alwashliyah dan ulama yang kerap dimintai fatwa terkait masalah keagamaan di lingkungan organisasi Alwashliyah, maka gagasannya ikut mempengaruhi pemikiran para pengikutnya.

Wujud nyata dari paham Islamis yang didukung Alwashliyah adalah dukungan mutlak organisasi ini terhadap pemimpin Muslim dan menolak pemimpin dari kalangan non-Muslim. Ada kesepakatan internal bahwa Alwashliyah hanya akan mendukung pasangan Muslim-Muslim dalam berbagai momen pesta demokrasi.⁴⁷ Sikap ini dipegang teguh oleh Alwashliyah hingga sekarang. Dewan Fatwa Alwashliyah bahkan telah mengeluarkan fatwa bahwa surah Alma'idah ayat 51 adalah dalil haramnya

⁴⁵ Ja'far, "Perspektif Aljam'iyatul Washliyah tentang Terorisme," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2017), 1-26.

⁴⁶ Ramli Abdul Wahid, *Peranan Islam dalam Menghadapi Era Globalisasi Sekuler*, 123-124.

⁴⁷ Wawancara dengan Yahya Tanjung, 31 Juli 2019.

memilih pemimpin yang tidak mukmin.⁴⁸ Selain itu, Dewan Fatwa juga memfatwakan bahwa “hukum *money* politik adalah haram untuk mendukung orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin”,⁴⁹ dan “perempuan tidak boleh menjadi kepala negara.”⁵⁰ Sikap ini menunjukkan komitmen Alwashliyah sebagai organisasi yang memperjuangkan Islam melalui konstitusi.

Alwashliyah dan Masalah Asas Tunggal

Anggaran dasar hasil Mukhtamar ke-XII Alwashliyah di Langsa pada tahun 1962, Alwashliyah tidak menegaskan Pancasila sebagai asas organisasi, tetapi disebutkan dalam pasal 1 tentang nama dan kedudukannya sebagai perkumpulan yang menerima dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia serta melaksanakan program kerjanya sesuai dengan manifesto politik Presiden.⁵¹ Pernyataan ini menjadi salah satu bukti bahwa Alwashliyah secara organisasi tidak mempermasalahkan ideologi negara, padahal pimpinan utama Alwashliyah periode ini (1962-1973) adalah dua tokoh penting Masyumi, yaitu Udin Sjamsuddin (pernah menjadi anggota DPR-RI) dan Muhammad Ali Hanafiah Lubis (anggota Majelis Konstituante). Meskipun demikian, Hasil Mukhtamar ke-XIII Alwashliyah tahun 1973, dua tokoh Masyumi, Udin Sjamsuddin dan

⁴⁸ Dewan Fatwa Aljam'iyatul Washliyah, “Keputusan Dewan Fatwa Pengurus Besar Aljam'iyatul Washliyah Nomor: 014/Kep./DF-AW/X/2016 tentang Pemahaman Surat Alma'idah: 51,” n.d.; Ja'far, “Aljam'iyatul Washliyah dan Problem Kepemimpinan Non Muslim dan Perempuan,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017).

⁴⁹ Dewan Fatwa Aljam'iyatul Washliyah, “Haram Memberi dan Menerima Suap Pilkada,” *Kabarmashliyah.com*, last modified 2013, <http://kabarwashliyah.com>.

⁵⁰ Dewan Fatwa Aljam'iyatul Washliyah, *Hasil-basil Sidang Dewan Fatwa Aljam'iyatul Washliyah yang Dilaksanakan pada Tanggal 15-18 Juli 1998 M / 21-24 Rabiul Awal 1419 H di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan* (Medan: Dewan Fatwa Aljam'iyatul Washliyah, 1998).

⁵¹ Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah, *Putusan-putusan Mukhtamar Al Dj. Washlijah Ke-XII Tanggal 30 Nop. s/d 4 Desember 1962 di Langsa* (Medan: Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah, 1962), 101.

Ahmad Dahlan menjadi pimpinan Alwashliyah,⁵² tetap belum menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi bahkan tidak disebut sekalipun di salah satu pasal dalam anggaran dasarnya.⁵³

Landasan dan asas nampaknya dibedakan oleh organisasi ini. Alwashliyah masih mengalami kebimbangan antara menerima Pancasila atau Islam sebagai dasar organisasi, sehingga keduanya dimasukkan dalam anggaran dasar dengan membuat pasal landasan dan pasal asas. Posisi pasal landasan (Pancasila dan UUD 1945) diletakkan lebih dahulu daripada pasal asas menunjukkan Alwashliyah mengutamakan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan ini penting dilihat mengingat pimpinan teras Alwashliyah masih dipegang oleh tokoh Partai Masyumi seperti Bahrum Jamil (Ketua Umum) dan Usman Pasaribu (Sekretaris Jenderal), sedangkan Dewan Fatwa, Penasehat dan Pertimbangan dipimpin oleh H. Yusuf Ahmad Lubis yang merupakan ulama Alwashliyah, eks politisi Partai Masyumi dan penulis buku keislaman. Yusuf Ahmad Lubis adalah penulis beberapa buku dalam bidang kristologi dan buku tentang bahaya komunis.⁵⁴

Sejak pemberlakuan undang-undang ormas No. 8 Tahun 1986, dimana salah satu aturan dalam undang-undang ini adalah Pancasila harus menjadi asas tunggal bagi setiap organisasi di Indonesia, beberapa ormas Islam menunjukkan sikap pro dan kontra, ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Persoalan asas tunggal juga memunculkan polemik dalam organisasi Alwashliyah. Izin pelaksanaan muktamar pun tidak kunjung dikeluarkan oleh pemerintah sebelum ada kepastian bahwa Alwashliyah akan menerima asas tunggal. Di internal Alwashliyah, muncul dua kubu sebelum dan pada saat muktamar berlangsung terkait masalah

⁵² Bahrum Jamil, *Alwashliyah Buah Hati Ummat Islam Indonesia Kini Sudah Berusia 46 Tahun* (Medan: Majelis Tabligh dan Tazkir (Penerangan) PB Alwashliyah, 1976), 23.

⁵³ Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah, *Aljam'iyatul Washlijah* (Medan: Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah, 1979).

⁵⁴ Khairuddin Said, *Pemikiran Islam Yusuf Ahmad Lubis* (Kuala Lumpur: UM Press, 2012).

asas tunggal, sehingga persoalan ini harus diselesaikan dengan melibatkan seorang ulama Alwashliyah yang bernama Syekh Mahmud Syihabuddin. Kedua kubu memohon pertimbangan dan fatwa kepada Syekh Mahmud yang akhirnya mengamini Pancasila sebagai asas organisasi demi masa depan organisasi dan agama Islam di Indonesia.⁵⁵

Seiring perkembangannya, Alwashliyah menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi.⁵⁶ Namun, organisasi ini tampak berwajah ganda yang memutuskan Pancasila sebagai asas organisasi, tetapi pada salah satu forum muktamar membuat satu pasal lain yang disebut pasal akidah. Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa Alwashliyah berakidah Islam. Hal ini merupakan strategi Alwashliyah agar kedua kubu yang saling berpolemik sama-sama dapat menerima dan polemik pun berakhir. Secara eksternal, keinginan rezim Orde Baru perihal asas tunggal dapat diakomodir. Hal menarik lain di periode ini adalah pimpinan Alwashliyah dipegang oleh kelompok muda. Secara ideologis, Muhammad Ridwan Ibrahim Lubis yang dipercaya sebagai Ketua Umum Alwashliyah berafiliasi dengan PPP, sedangkan Aziddin sebagai Sekretaris Jenderal berafiliasi dengan Golkar, yang sekaligus menjadi juru bicara pemerintah saat itu.⁵⁷ Sehingga kedua tokoh ini merupakan perpaduan antara Islamis dan nasionalis yang dapat mengamankan posisi Alwashliyah di hadapan penguasa.

Di era terkini, organisasi Alwashliyah sudah secara tegas menyatakan empat pilar kebangsaan: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI adalah final dan tidak bisa diganggu gugat. Pada tanggal 22 Desember 2015, Alwashliyah mendeklarasikan Tri Kebangsaan⁵⁸ yang

⁵⁵ Wawancara dengan Yahya Tanjung di Medan, 2018, 2019.

⁵⁶ Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah, *Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Besar Aldjam'iyatul Washlijah Priode Muktamar Ke XVI Februari 1986-April 1992* (Jakarta: Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah, 1986), 33.

⁵⁷ Ja'far, *Biografi Ketua Umum Pengurus Besar Aldjam'iyatul Washlijah 1930-2015* (Medan: Perdana Publishing-CAS, 2015).

⁵⁸ Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah, "Sikap Alwashliyah terhadap Indonesia Disampaikan Melalui Tri Kebangsaan," *Kabarwashlijah.com*.

merupakan hasil pemikiran pimpinan organisasi terhadap kondisi bangsa dan negara Indonesia, *pertama*, Alwashliyah akan mempertahankan dan menjaga NKRI. *Kedua*, Alwashliyah akan menjaga kerukunan umat beragama. *Ketiga*, Alwashliyah mendukung dan melibatkan diri secara aktif untuk merealisasikan dan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketenteraman bagi rakyat Indonesia dengan penuh tanggungjawab.

Setahun berikutnya, tepatnya pada 2 Desember 2016, Alwashliyah meluncurkan Ikrar Gerakan Tujuh Amanah Alwashliyah, disingkat G7 AW: *Pertama*, Menjaga semangat toleransi kerukunan umat beragama dalam bingkai kebhinekaan; *Kedua*, menegakkan *shibghah* dan *khittah* perjuangan dengan melaksanakan pendidikan, dakwah dan amal sosial; *Ketiga*, mendukung setiap kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat; *Keempat*, membela negara dari ancaman yang ingin merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara; *Kelima*, melakukan sinergitas dengan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan *Keenam*, melibatkan diri dengan turut serta dalam wadah internasional menyangkut nilai-nilai kemanusiaan.

Dari Berpolitik Praktis ke Ranah Independen

Secara historis, Alwashliyah tidak muncul sebagai organisasi politik. Di era Orde Lama, organisasi ini memutuskan untuk menjadi anggota istimewa Partai Masyumi. Selama era ini, jelas sekali Alwashliyah berpihak dan menjadi bagian dari partai politik. Sebab itu, Alwashliyah tidak lagi merupakan organisasi independen. Seluruh potensi organisasi ini dikerahkan untuk memenangkan Partai Masyumi. Alwashliyah secara resmi mengeluarkan dukungan secara tertulis terhadap partai ini, dan meminta seluruh keluarga besarnya untuk memilih Partai Masyumi pada pemilu tahun 1955. Fase ini merupakan masa dimana Alwashliyah berpolitik praktis. Seluruh tokoh organisasi ini bahkan menjadi pengurus partai dan anggota legislatif dari Fraksi Masyumi baik di level lokal maupun nasional.

Adnan Nur Lubis, salah seorang pendiri Alwashliyah sebagai pengecualian karena sebelum Partai Masyumi didirikan, ia telah menjadi politisi dari PNI dan sejak itu ia sudah tidak aktif sebagai pengurus Alwashliyah. Yang menarik adalah Alwashliyah tidak pernah memutuskan untuk menjadi partai politik tersendiri sebagaimana NU dan Perti. Tentu saja pada fase ini, tidak ada perbedaan pilihan politik di kalangan tokoh Alwashliyah, karena seluruhnya mendukung Partai Masyumi karena ada kesamaan antara tujuan Alwashliyah dengan partai Islam tersebut.

Kesamaan pilihan partai politik tidak lagi terulang di era Orde Baru. Sebagian tokoh Alwashliyah memang menjatuhkan pilihan hanya pada partai-partai Islam saja, tetapi sebagian tokoh lain lebih memilih berafiliasi dengan Golkar. Udin Sjamsuddin, M. Arsjad Thalib Lubis dan Adnan Benawy melibatkan diri dalam pendirian dan pengembangan Parmusi di Sumatera Utara. Udin Sjamsuddin sebagai Ketua Umum PB Alwashliyah menandatangani piagam pendirian Parmusi pada tanggal 17 Agustus 1967 sebagai bukti dukungan Alwashliyah terhadap Parmusi. Di era berikutnya, kelompok ini mendukung PPP sebagai fusi dari ragam partai Islam. Sebaliknya, sebagian tokoh Al Washliyah lain seperti Rivai Abdul Manaf, Fathi Dahlan, Nurlela Isbanda (anak Ismail Banda), Fery Fakhrudin, Umaruddin Sjamsuddin, Syaiful Anwar Tanjung dan Aziddin lebih memilih untuk bergabung dengan Golkar. Sejauh ini tidak ditemukan tokoh Alwashliyah yang berafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di era Orde Baru lantaran memang ada perbedaan ideologi dan tujuan Alwashliyah dengan PDI.

Mencermati substansi *Wijbah Alwashliyah* yang disahkan dalam muktamar Alwashliyah di Pekanbaru, ditemukan alasan mengapa tidak ada kader Alwashliyah yang bergabung dengan PDI yang merupakan fusi dari ragam partai seperti PNI, Partai Murba, IPKI, Parkindo, dan Partai Katolik. Pada masa inilah, kedua kubu (kelompok pendukung Parmusi atau PPP dan kelompok Golkar) mulai merebut pengaruh dalam organisasi

Alwashliyah. Tiga pemilu pertama di era Orde Baru, yaitu Pemilu 1971, Pemilu 1977 dan Pemilu 1982 menjadi cobaan bagi Alwashliyah karena tokoh-tokohnya terbelah menjadi dua kelompok, dan friksi ini akhirnya memunculkan kelompok ketiga yang mungkin bisa disebut kelompok independen.

Menurut Abd. Rahman Dahlan,⁵⁹ beberapa anggota PB Alwashliyah membawa simbol Alwashliyah ke dalam partai politik pada masa kampanye Pemilu tahun 1977. Bahrum Jamil sebagai Ketua Umum menyerukan warga Alwashliyah mendukung dan memilih PPP. Sedangkan Umaruddin Sjamsuddin (anak Udin Sjamsuddin) sebagai salah seorang pengurus PB Alwashliyah menggalang massa dari kalangan Alwashliyah untuk mendukung Golkar. Pasca Muktamar Alwashliyah tahun 1973, Udin Sjamsuddin tidak lagi menduduki jabatan Ketua Umum karena kalah dari Bahrum Jamil saat pemilihan Ketua Umum. Keduanya memang merupakan bekas politisi Masyumi. Bahrum Jamil melanjutkan cita-cita Partai Masyumi melalui PPP, sedangkan Udin Sjamsuddin pernah mendukung Parmusi saat masih menjadi Ketua Umum dan setelah itu tidak lagi aktif berpartai atau berpolitik karena faktor usia. Anak-anak Udin Sjamsuddin beralih ke Golkar.⁶⁰ Fenomena ini tentu membuat konstituen Alwashliyah menjadi rebutan kedua kelompok: PPP dan Golkar, meskipun pimpinan Alwashliyah sebelum tahun 1986 lebih didominasi oleh kader yang berafiliasi dengan PPP.

Masalah independensi organisasi sebetulnya sudah menjadi isu dalam Muktamar Alwashliyah pada tahun 1973 dan 1978, tetapi isu ini belum diakomodir dalam konstitusi organisasi. Dalam Muktamar Alwashliyah di Jakarta tahun 1986, kelompok independen menghendaki Alwashliyah menjadi organisasi independen. Setelah sekian lama Alwashliyah terlibat

⁵⁹ Abd. Rahman Dahlan, "Independensi Alwashliyah," in *Bunga Rampai Aljam'iyatul Washliyah*, ed. Ismed Batubara and Ja'far (Banda Aceh: Alwashliyah University Press, 2010), 56-57.

⁶⁰ Wawancara dengan Yahya Tanjung di Medan, 13 Juli 2019.

dalam politik praktis terutama di masa Orde Lama, dan di masa Orde Baru dimana Alwashliyah memiliki hubungan erat dengan Parmusi dan PPP, akhirnya Alwashliyah melalui forum muktamar memutuskan untuk menjadi organisasi independen. Arti independen tidak dijelaskan dalam anggaran dasar Alwashliyah. Sejak muktamar tahun 1986, Alwashliyah tidak memiliki tafsir anggaran dasar dan yang beredar saat ini adalah tafsir anggaran dasar terdahulu. Ramli Abdul Wahid⁶¹ dan Yahya Tanjung⁶² menilai bahwa arti Alwashliyah bersifat independen sebagaimana disebut dalam anggaran dasar sudah jelas dan tidak memerlukan tafsir.

Makna independen dalam Anggaran Dasar Alwashliyah tahun 1986 bisa dipahami berdasarkan tulisan dan penuturan tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyusunan pasal independen dalam anggaran dasar tersebut. Hasbullah Hadi sebagai saksi peletakan pasal independen dalam muktamar ini pernah menulis makalah berjudul “Independensi Alwashliyah sebagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan Islam,” yang disampaikan pada acara sarasehan Pimpinan Daerah Alwashliyah tingkat II Asahan pada tanggal 18 November 1990 di Indrapura (kini bagian dari Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara). Dalam makalah tersebut, ia menjelaskan bahwa arti independen dalam Anggaran Dasar Alwashliyah sesuai dengan semangat muktamar tahun 1986 adalah:

“Alwashliyah sebagai organisasi kemasyarakatan tidak terikat secara terstruktur organisatoris dengan organisasi kemasyarakatan lainnya di luar organisasi Alwashliyah. Alwashliyah tidak punya hubungan dan ikatan organisatoris dengan struktur organisasi politik yang ada di Indonesia dan tidak memiliki keterikatan dengan kesepakatan komitmen politik dengan ketiga kekuatan sosial politik. Namun secara pribadi sebagai warga negara, dengan tanpa membawa-bawa nama organisasi Alwashliyah, setiap anggota dibebaskan

⁶¹ Ramli Abdul Wahid menyebutkan makna independen sudah sangat jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan. Sebab itu, rapat mengeluarkan keputusan tentang penegasan independensi Alwashliyah. Hal ini ia sampaikan dalam rapat pengurus Dewan Fatwa Alwashliyah di rumah Ketua Dewan Fatwa Alwashliyah, 6 Desember 2018.

⁶² Wawancara dengan Yahya Tanjung di Medan, 13 Juli 2019.

untuk masuk dan aktif pada salah satu kekuatan sosial politik yang ada. Dengan ketentuan ini kita berharap “biarlah Alwashliyah ada dimana-mana tapi Alwashliyah jangan kemana-mana.”⁶³

Muhammad Ridwan Ibrahim Lubis yang juga pernah Ketua Umum PB Alwashliyah pada muktamar Alwashliyah tahun 1986. Selain sebagai saksi terkait pasal independen, ia juga menulis tafsir terhadap arti independen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Alwashliyah. Menurutnya, ada dua dasar sebagai pondasi independensi Alwashliyah. *Pertama*, independensi adalah kepribadian Alwashliyah dan makna Alwashliyah adalah menghubungkan dan lawannya adalah memutuskan. *Kedua*, secara historis pendirian organisasi Alwashliyah dilatari oleh adanya perpecahan di kalangan internal umat Islam. Ia kemudian mengatakan “kalau dia (Alwashliyah) digabungkan atau berafiliasi dengan salah satu partai atau ormas, maka hilanglah makna “washliyahnya” yaitu menghubungkan. Bahkan sebaliknya, ia menjadi terbatas hanya dengan partai dan ormas itu saja dan sempitlah ruang geraknya.” Alwashliyah secara tegas membolehkan anggotanya sebagai pribadi dan warga negara untuk berpartisipasi dalam partai dan ormas yang sah dan tidak bertentangan dengan ideologi negara Indonesia. Ia menegaskan bahwa “Aljam’iyatul Washliyah tetap independen secara organisasi, tetapi luas (membebaskan) untuk pribadi anggotanya (untuk berpolitik).⁶⁴

Tokoh penting lain adalah Bahrum Jamil yang merupakan Ketua Dewan Fatwa Alwashliyah terpilih ketika istilah independensi masuk dalam salah satu pasal dalam Anggaran Dasar Alwashliyah. Ia sendiri merupakan Ketua Umum PB Alwashliyah selama dua periode, mulai dari tahun 1973 sampai 1986. Ia menulis satu artikel yang di dalamnya memuat arti independensi Alwashliyah.

⁶³ Hasbullah Hadi, “Independensi Alwashliyah Sebagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan Islam” (Indrapura, 1990), 4.

⁶⁴ M. Ridwan Ibrahim Lubis, *Kepribadian Anggota dan Pengurus Alwashliyah* (Jakarta: PP HIMMAH, 1994), 6-9.

“Alwashliyah memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk memasuki atau menyalurkan keinginan politiknya melalui wadah Parpol dan Golkar yang ada dengan catatan tidak boleh membawa-bawa ataupun melibatkan Alwashliyah sebagai organisasi. Secara pribadi, anggota Alwashliyah dipersilahkan menyalurkan keinginan politiknya sesuai dengan haknya sebagai warga negara republik ini.”⁶⁵

Penjelasan ketiga tokoh sentral Alwashliyah di atas menunjukkan tafsir atas istilah independen dalam Anggaran Dasar Alwashliyah. Yahya Tanjung sebagai salah seorang panitia muktamar menguatkan bahwa makna independen hasil muktamar 1986 adalah bahwa Alwashliyah bukan partai politik, tidak terikat dengan suatu partai politik dan bukan bagian dari partai politik. Kegiatan dukung-mendukung suatu calon dalam Pilkada atau Pilpres, bertentangan dengan semangat independensi Alwashliyah.⁶⁶ Dapat dipahami bahwa sebagai organisasi, Alwashliyah bersifat independen, tidak memiliki hubungan dengan partai atau ormas tertentu, dan tidak mencampuri kegiatan politik praktis. Makna independen sebenarnya telah tersimpul secara jelas dalam arti dari nama Aljam’iyatul Washliyah, yaitu perhimpunan yang menghubungkan. Tetapi, Alwashliyah menegaskan bahwa setiap anggotanya sebagai pribadi bebas berpolitik dan memilih partai politik sepanjang sesuai dengan ideologi yang diakui di Republik Indonesia.

Pasal independensi Alwashliyah tidak serta merta dipatuhi oleh pengurus organisasi. Terbukti, Pengurus Wilayah (PW) Alwashliyah Sumatera Utara pernah menyatakan dukungan secara resmi dan tertulis terhadap Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, pertama pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 dan pasangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Alwashliyah juga terlibat dalam memberikan dukungan terhadap pasangan yang maju dalam Pilkada di tingkat Propinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

⁶⁵ Bahrum Jamil, *Batu Demi Batu di Bawah Panas yang Terik UISU Kami Dirikan* (Medan: Ma’had Muallimin Alwashliyah-UISU Medan, 1992), 328-331.

⁶⁶ Wawancara dengan Yahya Tanjung di Medan, 13 Juli 2019.

Dukungan tersebut memang banyak membuahkan hasil setidaknya dalam tiga kali Pilkada di Sumatera Utara. Pasangan yang didukung Alwashliyah selalu menang, dan kemenangan ini sering diklaim karena didukung oleh Alwashliyah sebagai ormas Islam terbesar di Sumatera Utara.

Pada Pilpres 2019, keputusan PW Alwashliyah Sumatera Utara yang mendukung Jokowi-Ma'ruf menimbulkan polemik dalam organisasi ini. Sebagian besar organisasi bagian Alwashliyah di tingkat pusat (Muslimat, IGDA, APA dan IPA) menolak keputusan yang dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar Alwashliyah. Kantor PW Alwashliyah Sumatera Utara didemo oleh warga Alwashliyah terutama dari elemen Muslimat Alwashliyah, IPA dan HIMMAH. Spanduk dukungan terhadap Jokowi-Ma'ruf diturunkan dan digantikan dengan spanduk bertuliskan "sukseskan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019, Aljam'iyatul Washliyah secara organisasi bersifat independen." Dewan Fatwa Alwashliyah mengeluarkan edaran terkait penegasan independensi Alwashliyah yang secara arif menolak Alwashliyah terlibat dalam aktivitas dukung-mendukung dalam Pilpres. PB Alwashliyah pun mengadakan rapat pleno khusus, 19 Desember 2018, dimana rapat berlangsung alot dan memakan waktu selama 11 jam, dan pada akhirnya memutuskan bahwa Alwashliyah bersifat independen dan memberikan sanksi terhadap PW Alwashliyah Sumatera Utara meskipun keputusan PB Alwashliyah dan edaran dari Dewan Fatwa Alwashliyah tersebut diabaikan.

Penutup

Studi ini menunjukkan bahwa ada dinamika perkembangan pemikiran politik dalam organisasi Alwashliyah. *Pertama*, ada pergeseran paradigma Alwashliyah terhadap ideologi negara, dimana organisasi ini mendukung dan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara secara konstitusional melalui wadah Partai Masyumi. Selanjutnya, Alwashliyah memperjuangkan syariat Islam sebagai sumber hukum negara melalui wadah Parmusi dan

PPP. Pada mulanya, Alwashliyah menolak Pancasila, tetapi secara perlahan organisasi ini menerima Pancasila bahkan memasukkannya dalam anggaran dasar sejak tahun 1978 sebagai hasil muktamar tahun 1978 di Pekanbaru dan dipertegas dalam muktamar tahun 1986 di Jakarta. Sampai saat ini, Alwashliyah menegaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 telah final menjadi dasar negara.

Kedua, Alwashliyah memang tidak muncul sebagai organisasi politik, melainkan organisasi sosial keagamaan tetapi tidak abai terhadap persoalan politik. Sebelum tahun 1986, tidak ada penjelasan resmi apakah Alwashliyah sebagai organisasi boleh berpolitik atau tidak. Sebab itulah, Alwashliyah menjadi anggota istimewa Partai Masyumi di era Orde Lama, mendukung pendirian Parmusi dan memiliki hubungan ideologis dan psikologis dengan PPP. Namun Muktamar Alwashliyah di Jakarta tahun 1986 akhirnya memutuskan bahwa Alwashliyah bersifat independen dimana organisasi ini tidak lagi memiliki hubungan dengan partai politik atau ormas manapun dan tidak mencampuri urusan politik praktis. Meskipun beberapa kasus menunjukkan bahwa pasal independensi ini kerap diabaikan oleh pengurus organisasi dengan dibuktikan dari adanya aktivitas dukungan resmi dan tertulis organisasi terhadap pasangan calon tertentu pada momen Pilpres maupun Pilkada. Fenomena ini selalu terjadi di Sumatera Utara yang merupakan basis konstituen dan amal usaha organisasi.

Referensi

- Asyari, Suaidi. "Ijtihad-Based Politics: The Muhammadiyah Political Participation in Post-Soeharto." *Studia Islamika* 15, no. 1 (2008).
- Azizy, Ahmad Hamim. *Al-Jam'iyatul Washliyah dalam Kancah Politik Indonesia*. Banda Aceh: PeNA, 2016.
- Barton, Greg, and Andree Feillard. "Nahdlatul Ulama, Abdurrahman

- Wahid and Reformation: What Does NU's November 1997 National Gathering Tell Us?" *Studia Islamika* 6, no. 1 (1999).
- Bush, Robin. "Redefining 'Political Islam' in Indonesia: Nahdlatul Ulama and Khittah '26.'" *Studia Islamika* 7, no. 2 (2000).
- Dahlan, Abd. Rahman. "Independensi Alwashliyah." In *Bunga Rampai Aljam'iyatul Washliyah*, edited by Ismed Batubara and Ja'far. Banda Aceh: Alwashliyah University Press, 2010.
- Emde, Bahari. "Wijhah Alwashliyah." In *Potret Histori, Edukasi Dan Filosofi*, edited by Ja'far. Medan: Perdana Publishing-CAS, 2012.
- Hadi, Hasbullah. "Independensi Alwashliyah sebagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan Islam." Indrapura, 1990.
- Hasanuddin, Chalidjah. *Aljam'iyatul Washliyah 1930-1942: Api dalam Sekam di Sumatera Timur*. Bandung: Pustaka, 1988.
- Heryanto, Gun Gun. *Literasi Politik Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*. Edited by Muhammad Hanifuddin. Pertama. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Sejarah Ulama-Ulama Terkemuka Di Sumatera Utara*. Medan: MUI Sumatera Utara, 1983.
- Ja'far. *Aljam'iyatul Washliyah: Cita-Cita Keislaman dan Keindonesiaan*. Banda Aceh: PeNA, 2018.
- . "Aljam'iyatul Washliyah dan Problem Kepemimpinan Non Muslim dan Perempuan." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017).
- . *Biografi Ketua Umum Pengurus Besar Aljam'iyatul Washliyah 1930-2015*. Medan: Perdana Publishing-CAS, 2015.
- . *Ikatan Pelajar Alwashliyah: Gerakan, Identitas dan Ideologi Pelajar Muslim di Nusantara 1953-2017*. Medan: Perdana Publishing, 2018.
- . "Khazanah Kitab Kuning di Madrasah Aljam'iyat Alwashliyah." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Althariqah* 2, no. 2 (2017): 124–134.
- . "Peran Aljam'iyatul Washliyah Dalam Merevitalisasi Madhhab Shafi'i di Era Kontemporer." *Justicia Islamica* 13, no. 1 (2016).
- . "Perspektif Aljam'iyatul Washliyah Tentang Terorisme." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2017).
- . "Respons Dewan Fatwa Aljam'iyatul Washliyah Terhadap Isu Akidah dan Syariah di Era Global." *Almanahij: Jurnal Kajian Hukum*

- Islam* 10, no. 1 (2016).
- . “Tarekat dan Gerakan Sosial Keagamaan Shaykh Hasan Maksum.” *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2015).
- . *Tradisi Intelektual Alwashliyah: Biografi Ulama Kharismatik dan Tradisi Keulamaan*. Medan: Perdana Publishing-CAS, 2015.
- Jamil, Bahrum. *Alwashliyah Buah Hati Ummat Islam Indonesia Kini Sudah Berusia 46 Tahun*. Medan: Majelis Tabligh dan Tazkir (Penerangan) PB Alwashliyah, 1976.
- . *Batu Demi Batu di Bawah Panas Yang Terik UISU Kami Dirikan*. Medan: Ma'had Muallimin Alwashliyah-UISU Medan, 1992.
- Karim, M. Husein Abd, ed. *21 Tahun Al Dj. Washliyah 30 Nov. 1930-30 Nov. 1951*. Medan: Pengurus Besar Aldjamijatul Washliyah, 1951.
- Koto, Alaidin. *Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI): Sejarah Pemikiran Keagamaan dan Pemikiran Politik (1945-1970)*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Lubis, M. Ridwan Ibrahim. *Kepribadian Anggota dan Pengurus Alwashliyah*. Jakarta: PP Himmah, 1994.
- Lubis, Muhammad Arsjad Thalib. *Ilmu Fiqih*. Medan: Islamiyah, 1982.
- Mona, Matu. *Rivajat Penghidoepan Alfadil Toean Sjech Hasan Ma'soem*. Medan: Sjarikat Tapanoeli, 1355.
- Munhanif, Ali. “The Khittah of 1926 Reexamined: Views of the NU in Post-Cipasung Congress.” *Studia Islamika* 3, no. 2 (1996).
- Said, Khairuddin. *Pemikiran Islam Yusuf Ahmad Lubis*. Kuala Lumpur: UM Press, 2012.
- Siddik, Dja'far, and Ja'far. *Alittibadiyah: Delapan Dasawarsa Menerangi Nusantara*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Sjamsuddin, Udin. *Chutbah Pengurus Besar Memperingati Ulang Tahun Aldjam'iyatul Washliyah Seperempat Abad (30 November 1930-30 November 1955)*. Medan: Pengurus Besar Aldjamijatul Washliyah, 1955.

- Sulaiman, Nukman. *Alwashliyah*. Medan: Pustaka Azizi, 1967.
- , ed. *Peringatan 1/4 Aldjamijatul Washlijah Abad*. Medan: Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah, 1956.
- Tanjung, Muaz. *Maktab Islamiyah Tapanuli 1918-1942: Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam Awal Abad Ke-20 Di Medan*. Medan: IAIN Press, 2012.
- Wahid, Ramli Abdul. *Peranan Islam dalam Menghadapi Era Globalisasi Sekuler*. Medan: Manhaji, 2016.
- Wardana, Amika, and Syahrul Hidayat. “The Multiplicity of Muhammadiyah’s Political Engagement in Indonesia’s DPD Election.” *Studia Islamika* 26, no. 1 (2019).
- Washlijah, Pengurus Besar Aldjamijatul. *Aljam’iyatul Washlijah*. Medan: Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah, 1979.
- . *Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Besar Aljam’iyatul Washlijah Priode Muktamar Ke XVI Februari 1986-April 1992*. Jakarta: Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah, 1986.
- . *Putusan-Putusan Muktamar Al Dj. Washlijah Ke-XII Tanggal 30 Nop. S/d 4 Desember 1962 Di Langsa*. Medan: Pengurus Besar Aldjamijatul Washlijah, 1962.
- . “Sikap Alwashliyah Terhadap Indonesia Disampaikan Melalui Tri Kebangsaan.” *Kabarwashlijah.com*.
- Washliyah, Dewan Fatwa Aljam’iyatul. “Haram Memberi dan Menerima Suap Pilkada.” *Kabarwashlijah.com*.
- Washliyah, Dewan Fatwa Aljam’iyatul. *Hasil-Hasil Sidang Dewan Fatwa Aljam’iyatul Washlijah Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 15-18 Juli 1998 M / 21-24 Rabiul Awal 1419 H Di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Medan*. Medan: Dewan Fatwa Aljam’iyatul Washlijah, 1998.
- Washliyah, Dewan Fatwa Aljam’iyatul. “Keputusan Dewan Fatwa Pengurus Besar Aljam’iyatul Washlijah Nomor: 014/Kep./df-AW/X/2016 Tentang Pemahaman Surat Alma’idah: 51,” n.d.

